PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, BELANJA MODAL DAN PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh :

Asnita,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Harlen,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Ando Fahda Aulia,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

.Article Info

Article History :

Received 16 July - 2022

Accepted 25 July - 2022

Available Online

31 July - 2022

Abstract

This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product (GRDP), capital expenditures and human development on poverty in Kuantan Singingi Regency. Methods of data analysis using analytical methods using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that gross regional domestic product (GRDP) has a significant negative and significant effect on poverty in Kuantan Singingi Regency, meaning that poverty reduction is due to an increase in gross regional domestic product (GRDP) will increase the ability to meet needs so that they can get out of poverty. line of poverty. Capital expenditure has a positive and significant effect on poverty in Kuantan Singingi Regency, meaning that an increase in capital expenditure actually encourages higher poverty. This is contrary to the hypothesis which states that capital expenditure has a negative and significant effect on poverty in Kuantan Singingi Regency. The human development index (HDI) has a positive and significant effect on poverty in Kuantan Singingi Regency, which means that partially changes in the human development index (IPM) are able to positively and significantly affect changes in poverty.

Keyword :

Poverty, Gross Regional Domestic Product (GRDP), Capital Expenditures and Human Development

1. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian akan menentukan kemiskinan disuatu daerah, semakin tinggi perekonomian maka hal tersebut akan menggambarkan bahwasanya kemampuan memenuhi kebutuhan akan semakin meningkat. Namun, yang menjadi persoalan justru pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat tetapi kemiskinan juga mengalami peningkatan.

Menurut Bigsten dan Levin (2000), menjelaskan bahwa dalam mengatasi kemiskinan harus memperhatikan beberapa elemen strategis diantaranya : penggerak ekspor melalui pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan strategi *outward-oriented*, lebih difokuskan pada sektor manufaktur, pengembangan sektor pertanian menggunakan berbagai inovasi teknologi terbaru, serta penanaman modal yang difokuskan pada modal fisik dan modal manusia dan berbagai

cara untuk mendorong kesehatan, pendidikan, *social capital*, dan jaring dalam mendeteksi jumlah kemiskinan.

Teori yang menjelaskan terjadinya kemiskinan dikenal dengan istilah lingkaran setan kemiskinan, seseorang, daerah ataupun negara miskin hal tersebut karena memang mereka miskin, dan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan tersebut sama sekali tidak ada pemutusannya yang ada orang tersebut terjebak dalam lingkaran tersebut atau dikenal juga dengan istilah "*a poor country is poor because it is poor*" yang mana teori yang dikenalkan oleh Ragnar Nurkse ini menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan ialah pada tingkat produktivitas yang dimiliki rendah sehingga perlu langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut (Kuncoro, 2013). Salah satu aspek ialah kondisi perekonomian

masyarakat itu sendiri salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik.

Ketersediaan infrastruktur ialah hal yang sangat diperhatikan dalam kegiatan perekonomian, hal tersebut karena semakin tingginya ketersediaan infrastruktur tentunya akan mengatasi keterbatasan yang dihadapi oleh setiap daerah, seperti infrastruktur jalan yang menjadi bagian penting dalam pergerakan baik itu distribusi manusia maupun barang yang tentunya akan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu ketersediaan berbagai infrastruktur sosial lainnya juga akan mendorong peningkatan pendidikan dan kesehatan yang menjadi gambaran dari kualitas SDM itu sendiri dengan demikian akan menciptakan masyarakat yang produktif serta mampu memenuhi kebutuhannya dan dapat terhindar dari kemiskinan. Sehingga semakin meningkatnya ketersediaan infrastruktur melalui investasi fisik maka akan semakin menurunkan angka kemiskinan.

Selain itu, investasi infrastruktur fisik juga menjadi salah satu elemen penting dalam pengurangan kemiskinan, adapun yang dimaksud dengan investasi infrastruktur fisik ialah keseluruhan pengeluaran yang akan membentuk modal baru (Mankiw, 2013). Belanja modal sebagai salah satu bentuk pengeluaran yang dilakukan terutama oleh pemerintah. dalam upaya mengadakan dan membangun berbagai ketersediaan asset yang dapat digunakan dalam periode satu tahun bertujuan untuk operasional pemerintah dapat dimuat didalam pengeluaran pemerintah dalam pos belanja modal, yang mana pengeluaran tersebut dapat berupa tanah, jalan, jaringan dan irigasi serta peralatan mesin, gedung dan aset tetap lainnya (Darise, 2008). dalam upaya memprioritaskan belanja modal untuk perlindungan serta peningkatan kehidupan yang berkualitas dalam kewajiban mewujudkan pelayanan publik dari keseluruhan berbagai aspek penunjang secara layak. Sehingga ketersediaan tersebut akan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan demikian dapat mendorong peningkatan kemampuan hidup sehingga terbebas dari kemiskinan.

Human capital digambarkan melalui kondisi indeks pembangunan manusia (IPM), hal tersebut sebagai indikator komposit atau gabungan dari beberapa indikator yang tidak dapat sebagai ukuran utama pengukuran berbagai dimensi pembangunan manusia, penilaian pembangunan manusia agar dapat menggambarkan kemampuan dasar melalui tiga dimensi pokok.

Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pembangunan bertujuan untuk mendorong peningkatan pembangunan manusia. Hal tersebut

karena manusia berperan penting dalam pembentukan karakter sehingga Negara mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang lebih modern yang bertujuan untuk menumbuhkan keberlanjutan pembangunan. Menurut BPS (2022c), dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia dilihat dari 3 indikator yakni pendidikan, kesehatan dan pengeluaran berkaitan dengan masyarakat yang mengalami peningkatan produktivitas. Produktivitas masyarakat yang mengalami peningkatan akan terlihat dari masyarakat yang memiliki kesehatan yang baik dan pendidikan yang berkualitas dan dapat mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi.

Perkembangan persentase penduduk miskin diketahui bahwa terdapat 5 kabupaten dengan kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau. Adapun diantara 5 daerah tersebut yaitu Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti. Beban pembangunan semakin besar pada saat jumlah penduduk miskin meningkat. Sehingga penurunan kemiskinan akan semakin ditekan oleh peningkatan pembangunan ekonomi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipengaruhi oleh banyak aspek, tidak hanya ekonomi tetapi juga aspek sosial. Banyak faktor yang dapat mendorong bahkan mengatasi kemiskinan.

Diantara daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi ini tentunya akan menjadi persoalan yang harus diatasi tidak hanya oleh pemerintahan Provinsi Riau tetapi juga oleh pemerintahan masing – masing kabupaten tersebut. Melihat kondisi kemiskinan tersebut maka kajian terkait kemiskinan akan menjadi sangat menarik untuk dibahas, salah satu daerah yang perlu dibahas yakni Kabupaten Kuantan Singingi yang masuk kedalam 5 daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi serta terkait dengan kondisi kemiskinan dan faktor dipengaruhi oleh faktor tersebut. Berikut ini dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2011	31,10	10,19
2	2012	31,30	10,29
3	2013	34,70	11,28
4	2014	33,52	10,75
5	2015	34,10	10,80
6	2016	31,22	9,85
7	2017	31,95	9,97

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
8	2018	32,10	9,92
9	2019	31,22	9,56
10	2020	29,34	8,91
11	2021	28,90	8,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kuansing (2021)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana jika dilihat jumlah penduduk miskin berfluktuatif dimana dari tahun 2011 – 2021. Jika dilihat jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 34,70 ribu jiwa begitu juga halnya dengan persentase penduduk miskin di tahun 2013 juga tertinggi yaitu sebesar 11,28%. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin terendah selama 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 sebesar 31,22 ribu jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin terendah pada tahun 2016 yaitu 9,85%.

Kondisi pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung dengan besarnya pendapatan yang diterima atau kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa dalam periode satu tahun atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Hal tersebut karena PDRB menggambarkan besaran pendapatan masyarakat di suatu daerah karena dalam perhitungan PDRB mencakup 17 sektor usaha yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. sehingga pada saat PDRB mengalami peningkatan maka akan menggambarkan pendapatan masyarakat disuatu daera tersebut.

Berikut ini dapat dilihat perkembangan PDRB di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 2 Perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2021

No	Tahun	PDRB (Milyar Rp)
1	2011	17.307,01
2	2012	18.333,20
3	2013	19.336,93
4	2014	20.331,20
5	2015	19.896,35
6	2016	20.669,80
7	2017	21.574,02
8	2018	22.579,12
9	2019	23.613,56
10	2020	23.843,43
11	2021	24.689,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat perkembangan PDRB di Kabupaten Kuantan Singingi jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan yang tergambar dengan jumlah

penduduk miskin justru berlawanan, dimana pada saat tahun 2017 – 2018 PDRB meningkat seharusnya jumlah kemiskinan menurun akan tetapi di Kabupaten Kuantan Singingi justru mengalami peningkatan menjadi 31,95 ribu jiwa ditahun 2017 dan 32,10 ribu jiwa di tahun 2018, tentunya hal ini berlawanan dengan penjelasan teori diatas.

Selain itu, belanja modal juga merupakan faktor yang dapat mendorong penurunan kemiskinan, semakin meningkatnya alokasi belanja modal maka akan mendorong meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Berikut ini dapat dilihat perkembangan belanja modal di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 3 Perkembangan dan Pertumbuhan Belanja Modal di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2021

No	Tahun	Belanja Modal (Jutaan Rp)	Pertumbuhan Belanja Modal (%)
1	2011	131.220	-
2	2012	201.305	53,41
3	2013	310.518	54,25
4	2014	364.621	17,42
5	2015	246.440	-32,41
6	2016	178.016	-27,76
7	2017	203.273	14,19
8	2018	196.801	-3,18
9	2019	327.963	66,65
10	2020	204.766	-37,56
11	2021	153.486	-25,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

pada saat dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di tahun 2017 seharusnya jumlah kemiskinan menurun akan tetapi di Kabupaten Kuantan Singingi justru mengalami peningkatan menjadi 31,95 ribu jiwa, tentunya hal ini berlawanan dengan penjelasan teori bahwa peningkatan pengeluaran bidang fisik akan menurunkan kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia yang tergambar dari indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi hal yang sangat penting dalam penurunan kemiskinan, semakin baik IPM maka menggambarkan kondisi kualitas SDM yang semakin berkualitas sehingga hal ini akan mendorong penurunan kemiskinan, berikut ini dapat dilihat perkembangan IPM di kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 4 Perkembangan dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011 - 2021

No	Tahun	IPM	Pertumbuhan IPM (%)
1	2011	65,72	
2	2012	66,31	0,89
3	2013	66,65	0,51
4	2014	67,47	1,23
5	2015	68,32	1,26
6	2016	68,66	0,49
7	2017	69,53	1,27
8	2018	69,96	0,62
9	2019	70,78	1,17
10	2020	70,31	-0,66
11	2021	70,60	0,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau (2021)

kondisi kemiskinan justru berlawanan, meskipun IPM meningkat tetapi terdapat di beberapa kondisi justru kemiskinan juga mengalami peningkatan seperti di tahun 2013 IPM meningkat tetapi kemiskinan juga mengalami peningkatan begitu juga dengan tahun 2017 dan 2018 yang mana kemiskinan mengalami peningkatan, hal ini tentunya berlawanan dengan penjelasan teori.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kemiskinan

Menurut Suryawati (2004), ketika masyarakat di suatu daerah memiliki keterbatasan dalam pemenuhan rata – rata standar hidupnya maka itu dikatakan sebagai kemiskinan. Keadaan dimana pendapatan memiliki kemampuan yang rendah dalam pemenuhan kebutuhan diantaranya kebutuhan sandang, papan dan pangan. Sehingga dengan rendahkan upaya dalam pemenuhan kebutuhan ini tentunya akan mendorong masyarakat memiliki kualitas hidup yang rendah.

Pada dasarnya tercukupinya kebutuhan pangan bukan berarti hal tersebut menjelaskan bahwa kondisi standar hidup masyarakat terpenuhi, namun segala kebutuhan diluar pangan terpenuhi diantaranya pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kesejahteraan didaerah dapat juga terlihat dari kelayakan dari tempat tinggal sehingga akan menjadi salah satu standar hidup yang baik. Oleh karena itu, pada saat pendapatan masyarakat tidak mampu memenuhi hal tersebut maka dapat dikatakan sebagai penduduk miskin dengan kesejahteraan yang rendah (Suryawati, 2004).

Keberagaman kemiskinan dapat dilihat dari bentuknya dari aspek pendapatan terbagi menjadi 2 bagian yaitu (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Absolut

Situasi dimana pendapatan yang dimiliki seseorang berada dibawah garis kemiskinan dalam mencukupi kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan maka seseorang tersebut diklasifikasikan sebagai bentuk kemiskinan absolut.

2. Kemiskinan Relatif

Bentuk kemiskinan relative yaitu pada saat pemenuhan kebutuhan dasar melebihi standar garis kemiskinan namun saat dibandingkan dengan masyarakat lainnya justru berada dibawah masyarakat. Kemiskinan juga dapat dilihat dari penyebabnya yaitu (Suryawati, 2004):

1. Kemiskinan Kultural

Disebabkan oleh eratnya hubungan masyarakat dengan upaya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik meskipun dalam upaya tersebut dibantu oleh pihak lain.

2. Kemiskinan struktural

Dimana penyebab kemiskinan dengan adanya faktor manusia lainnya yang sengaja meremehkan kondisi tersebut karena adanya ketidakadilan sistem pembangunan.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Belanja modal untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordriawan, 2010). Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

Kategori belanja modal sebagai berikut (Nordriawan, 2010):

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda
- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda
- 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. Belanja Modal adalah

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keterbatasan modal ialah hal yang menjadi penghambat perkembangan ekonomi, pemicu tersebut ialah kondisi dimana jumlah penduduk miskin yang terdapat di Indonesia. Masyarakat sebuah negara terbelakang terhambat karena kemiskinan, mayoritas mereka tidak terdidik serta buta huruf. Sehingga produktivitas marginal makin menurun akan berdampak juga pada pendapatan negara yang kecil. (Jhingan, 2016).

Dalam pembangunan daerah perkotaan dan pedesaan sering kali memiliki berbagai hambatan salah satunya yaitu masalah terkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih dapat dikatakan rendah, sedangkan sumber daya manusia merupakan pelaku utama kegiatan ekonomi agar dapat semakin tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia agar dapat diwujudkan (Dwijatenaya & Raden, 2016).

Human capital bisa tercapai dengan melewati 2 cara. Pertama, manusia dipergunakan sebagai tenaga kerja berdasarkan jumlah kuantitatifnya. Hal demikian mengartikan bahwa bertambah banyak jumlah tenaga kerja sehingga produktivitas makin tinggi. Kedua, investasi ialah cara pokok dalam memperoleh *human capital*. Pelatihan serta pendidikan yang diperoleh manusia akan menaikkan keterampilan serta potensinya, dengan demikian produktivitas akan mengalami kenaikan. Cara kedua ini namun tak memprioritaskan kuantitas jumlah tenaga kerja.

Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan kerangka penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Produk domestic regional beruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi, penelitian ini merupakan penelitian sekunder yang menggunakan data sekunder yaitu data *time series* dalam bentuk data tahunan dari tahun 2011 – 2021. Adapun penelitian ini dilakukan sejak bulan Desember 2021 sampai selesai. Agar tidak ada kekeliruan dalam mengartikan apa yang menjadi objek penelitian, maka yang akan menjadi variabel dan definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Satuan
1	Kemiskinan (Y)	Kemiskinan adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2021a)	Jiwa
2	PDRB (X1)	Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan (BPS, 2021), disini data yang digunakan PDRB ADHK	Rupiah
3	Belanja Modal (X2)	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud (BPS, 2021)	Rupiah
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3)	IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (BPS, 2021).	Rasio

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat metode analisis model regresi berganda dengan teknik analisis kuadrat terkecil sederhana (*Ordinary Least Square (OLS)*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis regresi berganda teknik analisis (*Ordinary Least Square (OLS)*) dengan bantuan aplikasi *SPSS*. Gujarati (2006) mendefinisikan analisis regresi berganda adalah studi tentang hubungan antara

satu variabel tak bebas atau variabel yang dijelaskan dan satu atau dua lebih variabel lain yang disebut variabel bebas atau variabel penjelas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Statistik

Uji statistic ialah uji yang dapat melihat ketetapan model berdasarkan beberapa uji diantaranya parsial (uji t), uji simultan (uji F), serta juga menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel dependennya (R^2).

Uji Simultan (Uji F)

Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara serempak dapat diketahui menggunakan uji simultan atau uji F. pada saat nilai signifikan signifikansi (sig) F memiliki angka yang kecil dari 0,05.

Tabel 6 Uji Simultan (Uji F)

Keterangan	Prob.
F Sig	0.002

Sumber: Data Olahan SPSS, (2021)

Berdasarkan tabel uji simultan diperoleh nilai probability sebesar 0.002 nilai ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 0,05, hal ini berarti bahwa Pengeluaran PDRB (LNx1), belanja modal (LNx2), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (LnX3) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

Uji Parsial (Uji t)

Untuk melihat pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu melalui uji parsial atau uji t yang mana variabel dikatakan berpengaruh pada saat nilai probabilitinya lebih kecil dari 0,05.

Tabel 7 Analisis Uji Parsial (Uji t)

Variable	Prob.
LNx1	0.000
LNx3	0.005
LNx4	0.009

Sumber: Data Olahan SPSS, (2021)

Analisis uji parsial menunjukkan hasil yang dijelaskan berikut ini:

1. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (LNx1)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki nilai probability sebesar 0,0000 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. hal ini menjelaskan bahwa hasil penelitian menerima H1 dan menolak H0 dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Variabel Pengeluaran Belanja Modal (LNx2)

Pengeluaran belanja modal memiliki nilai probability sebesar 0,005 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% pengeluaran belanja modal signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (LNx3)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probability sebesar 0,009 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% Indeks Pembangunan Manusia signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negative terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan.

Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau nilai Adjusted R-square ialah untuk melihat seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat.

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Keterangan	Prob.
Adjusted R-square	0.778

Sumber: Data Olahan SPSS, (2021)

Pada tabel uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (LNx1), pengeluaran belanja modal (LNx2) dan IPM (LNx3) 77,8% mempengaruhi

kemiskinan. Sedangkan 22,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1 maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi akan meningkat 1,153%.

Analisis Hasil Regresi

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient
LNX1	-0,545
LNX2	0.126
LNX3	1.153
C	2.446

Sumber: Data Olahan SPSS, (2021)

Tabel diatas ialah analisis regresi linear berganda, yang mana persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2,446 - 0,545LNX1 + 0,126LNX2 + 1.153LNX3$$

Persamaan ini menjelaskan :

1. Koefisien Konstanta
Menunjukkan konstanta sebesar 2,446. Hal ini berarti semua variabel indenpenden (pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan IPM) diasumsikan bernilai tetap, maka dapat dikatakan bahwa Y (kemiskinan) sebesar 2,446 ribu jiwa.
2. Koefisien Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (LNX1)
Dari persamaan regresi dapat diketahui bahwa pengaruh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan asumsi *ceteris paribus* dengan memiliki nilai koefisien sebesar -0,545 jika PDRB meningkat sebesar 1% maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,545%.
3. Koefisien Belanja Modal (LNX2)
Dari persamaan regresi dapat diketahui bahwa pengaruh belanja modal dan variabel lain dengan asumsi *ceteris paribus* dengan nilai koefisien variabel belanja modal menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,126 yang artinya jika belanja modal meningkat 1% maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peningkatan sebesar 0,126%.
4. Koefisien IPM (LNX3)
Dari persamaan regresi dapat diketahui bahwa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 1,153, pada saat Indeks

Pembahasan

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil analisis data terkait pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi diperoleh hasil bahwasanya secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi karena memperoleh nilai probability yang kecil dari 0,05 yaitu 0,0000, yang artinya pada saat pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan mendorong penurunan kemiskinan. Adapun nilai koefisien sebesar sebesar -0,545 jika PDRB meningkat sebesar 1 % maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami penurunan sebesar 0,545% dan variabel lain di anggap tetap.

Melihat hasil analisis ini tentunya menerima hipotesis yang menyatakan bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan, dimana peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan mendorong penurunan kemiskinan.

Menurut Ijaiya et al. (2011), kemiskinan adalah keadaan kekurangan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kemiskinan juga merupakan kondisi dimana sumberdaya yang berkualitas rendah sehingga hal tersebut akan membatasi kemampuan pemenuhan kebutuhan dan ekonomi. Kemiskinan terlihat jelas di berbagai cara yang meliputi antara lain, kurangnya pendapatan, pasokan makanan yang tidak memadai, kurangnya, atau tidak ada akses ke pendidikan dan fasilitas penting lainnya, kekurangan atau tidak tersedianya sumber daya produktif untuk keberlanjutan mata pencaharian, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, tunawisma.

Ada banyak teori dan pemikiran ekonomi yang menganjurkan pengurangan kemiskinan dalam banyak cara: Ekonom Kesejahteraan Klasik (Adam Smith, Karl Max dan lain lain) berpendapat bahwa kesejahteraan dan kekayaan rakyat adalah fungsi dari nilai suatu barang-dagangan yang dihasilkan oleh tenaga kerja mereka serta daya beli mereka atas barang-dagangan lain tenaga kerja orang. Dengan kata lain, tenaga kerja yang lebih tinggi mengarah pada output dan pendapatan yang lebih tinggi yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan. Aliran pemikiran ini juga menyukai

"tangan tak terlihat", yaitu, operasi bebas dari sistem pasar secara otomatis

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan menggambarkan kondisi pergerakan ekonomi pada saat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat periode tertentu. Dengan demikian terutama kegiatan ekonomi merupakan proses di mana faktor-faktor produksi digunakan untuk menghasilkan produksi. Proses ini pada gilirannya mengarah pada aliran kompensasi ke faktor produksi public.

Pertumbuhan ekonomi ialah salah satu bentuk perhitungan yang bertujuan untuk menjelaskan perubahan perekonomian dari perbandingan tahun tertentu yang terus berkembang (Sukirno, 2013). Dengan adanya peningkatan jumlah PDB/PNB tidak tergantung kepada perubahan pertumbuhan penduduk, kondisi pada struktur ekonomi serta perbaikan sistem kelembagaan yang mengalami perubahan ataupun tidak hal tersebut merupakan gambaran dari kondisi pertumbuhan ekonomi.

Manfaat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah diterimanya. Dengan demikian, maka pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kondisi ini dapat membuka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan sebagai akibat dari meningkatnya ketimpangan pendapatan yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih memihak penduduk kaya dibanding penduduk miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Sartiyah (2018) Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau. PDRB berpengaruh menurunkan kemiskinan begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Wulantika (2020) Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara (2010-2018) ditemukan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqraam dan Sudibia (2019), tentang pengaruh

PDRB, pendidikan, kesempatan kerja, dan persentase penduduk sektor informal terhadap kemiskinan di Provinsi Bali dimana diketahui bahwa PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya belanja modal memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi akan tetapi pengaruhnya justru terlihat memiliki pengaruh yang positif yang artinya peningkatan belanja modal justru mendorong peningkatan kemiskinan, hal ini tidak sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwasanya belanja modal berpengaruh negative terhadap kemiskinan. Adapun besaran nilai sebesar 0,005 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% pengeluaran belanja modal signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya pengeluaran belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. Pengaruh belanja modal dan variabel lain dengan asumsi *ceteris paribus* dengan nilai koefisien variabel belanja modal menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,126 yang artinya jika belanja modal meningkat 1% maka kemiskinan meningkat sebesar 0,126%.

Belanja modal adalah alokasi dari belanja pemerintah yang diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah aset yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Adapun bentuk aset tersebut yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Tentunya belanja ini akan memberikan kemudahan akses baik yang berhubungan dengan ekonomi maupun sosial masyarakat. Sehingga, semakin meningkat belanja modal akan mendorong peningkatan infrastruktur sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Belanja modal tentunya bukan belanja yang difokuskan untuk memberantas kemiskinan akan tetapi melalui alokasi belanja modal diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong upaya peningkatan produktivitas selanjutnya dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam teori lingkaran kemiskinan yang dikenal dengan lingkaran setan kemiskinan, seseorang, daerah ataupun negara miskin hal tersebut karena memang mereka miskin, dan untuk terlepas dari belenggu kemiskinan tersebut sama sekali tidak ada pemutusannya yang ada orang tersebut terjebak dalam lingkaran tersebut atau dikenal juga dengan istilah “*a poor country is poor because it is poor*” yang mana teori yang dikenalkan oleh Ragnar Nurkse ini menjelaskan bahwa yang menjadi persoalan ialah pada tingkat produktivitas yang dimiliki rendah sehingga perlu langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut (Kuncoro, 2013).

Berdasarkan pengalokasian asset yang dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung dan pembangunan jalan akan tetapi yang menjadi fenomena yang terjadi ialah adanya banyak pembangunan yang makrak yang pembangunannya tertunda sedangkan alokasi dana telah dilakukan untuk kegiatan tersebut.

Selain itu, yang sangat disayangkan ialah bangunan yang didirikan itu sendiri bukanlah yang mendorong peningkatan produktivitas masyarakat secara umum, yang apada khirnya kegiatan tersebut justru hanya akan menambah beban anggaran yang harus dikeluarkan daerah untuk alokasi belanja.

Kajian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aimon, Kurniadi dan Satrio (2020) Analisis untuk jangka panjang adalah pertumbuhan inklusif pada kemiskinan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengeluaran pemerintah, hal tersebut karena dengan pengeluaran pemerintah maka akan mendorong peningkatan investasi yang dapat mengganggu keseimbangan pertumbuhan inklusif pada pengurangan dan ketimpangan pendapatan. Adapun pengeluaran pemerintah yang dimaksud dalam penelitian nya ialah belanja yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jaringan, gedung, dan bangunan yang mana pengeluaran ini ialah bentuk dari kegunaan belanja modal.

Hubungan positif antara belanja modal terhadap kemiskinan juga ditemukan hasil yang sama oleh Amami dan Asmara (2022), bahwasanya belanja modal berpengaruh positif akan tetapi hasil tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi

Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,009 yang mana nilai ini lebih kecil dari 0,05, yang mana ini menjelaskan bahwa pada tingkat 5% Indeks Pembangunan Manusia signifikan mempengaruhi kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil analisis ini tidak sesuai dengan hipotesis bahwasanya Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi. Karena pada penelitian justru ditemukan pengaruh yang positif terhadap kemiskinan. pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan nilai koefisien sebesar 1,153, pada saat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat sebesar 1% maka kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi akan meningkat 01,153%.

Sumber daya manusia yang terdapat di daerah juga akan menentukan kemiskinan, hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia tidak memiliki kualitas yang baik tentunya akan memiliki produktivitas yang rendah. Salah satu kualitas sumber daya manusia dikenal dengan *human capital*, adapun yang dikatakan dengan *human capital* yaitu modal yang berbeda dengan modal yang lain karena sekolah, kursus, biaya yang dikeluarkan untuk kesehatan, kuliah juga merupakan modal yang memperbaiki kesehatan, meningkatkan penghasilan, atau menambah apresiasi (penghargaan) terhadap seseorang selama hidupnya (Becker, 1993).

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Sayifullah & Gandasari, 2016), bahwa variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dan berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edfrida (2019) yang menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Yang mana hal ini menjelaskan perubahan kondisi IPM belum mampu mempengaruhi perubahan kemiskinan.

Meskipun demikian indikator penentu IPM sangat perlu di tingkatkan mengingat IPM merupakan penentu ukuran dari kualitas SDM banyak aspek yang perlu dikembangkan salah satunya seperti kualitas pendidikan, dimana harapan tingkat pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi yang belum mencapai angka yang diharapkan sehingga perlunya upaya untuk mendorong hal tersebut. Adapun hal yang dapat dilakukan merupakan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk masa yang akan mendatang sehingga SDM yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi dapat bersaing dalam segi kualitas.

5. KESEMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Produk domestik regional bruto (PDRB) berpengaruh signifikan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, artinya penurunan kemiskinan hal ini dikarenakan pada saat Produk domestik regional bruto (PDRB) meningkat akan meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan.
2. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, artinya peningkatan belanja modal justru mendorong semakin tingginya kemiskinan hal ini berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Hubungan positif ini didorong karena pembangunan yang bersumber dari belanja modal yang belum dialokasikan tepat sasaran yang dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat.
3. Indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, yang artinya secara parsial perubahan indeks pembangunan manusia (IPM) mampu mempengaruhi perubahan kemiskinan secara positif dan signifikan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi didominasi berada pada sektor pertanian terlebih lagi pendidikan yang masih rendah sehingga masih rendahnya produktivitas yang akhirnya indeks pembangunan manusia belum mampu mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bigsten, A. & Levin, J. (2001). *Growth, Income Distribution and Poverty*. Working Paper in Economic.
- Datt, G., Ravallion, M., & Murgai, R. (2016). *Growth, Urbanization And Poverty Reduction In India*. *NBER Working Paper No. 21983*, 1-45.
- Dwijatenaya, I. M., & Raden, I. (2016). *Pembangunan Perdesaan Dan Pembangunan Agribisnis (Suatu Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesejahteraan)*. Gunung Kombeng : LPPM Unikarta Press.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ijaiya, G. T., Ijaiya, M. A., Bello, R. A., & Ajayi, M. A. (2011). *Economic Growth And Poverty Reduction In NigeriA*. *International Journal of Business and Social Science* 2(15), 147- 154.
- Jhingan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2013). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mankiw, N. G. (2013). *Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Sayifullah, & Gandasari, T. R. (2016). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten*. *Jurnal Ekonomi-Qu* 6(2), 115-273.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2018). *Determinan Kemiskinan Di Provinsi Kepulauan Riau*. *Dimensi* 8 (2), 249-265.